

**PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT
OLEH DINAS KEIAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Muh. Feisal Ariwiguna Asimu dan Rian Dwi Hapsari

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: feismuhammad@gmail.com

AbstrAct

The potential of Indonesian sea is very extraordinary, including seaweed. Seaweed has great potential and can be cultivated by Indonesian people so that increase employment. Of course in this case need support from the community and the local government. The purpose of this study was to find out the efforts made by the government and obstacles in the empowerment of seaweed farming communities in Kamelanta Village. The author uses descriptive research methods with an inductive approach, data collection techniques used are interviews, observation and documentations. Some of the obstacles that occur in seaweed cultivation are the excessive dependence of seaweed farmers on the government, lack of understanding of business people on empowerment and lack of infrastructure such as modern factories in supporting the processing of products that are more economically valuable. Based on the results of the study, there were several efforts at the Marine and Fisheries Service such as: 1) inviting foreign investors, 2) creating programs such as saffver for sustainable development by cultivators to process seaweed as a form of food security.

Keywords: *empowerment, seaweed farmers, seaweed*

ABSTRAK

Potensi laut Indonesia sangat luar biasa, termasuk rumput laut. Rumput laut memiliki potensi yang besar dan dapat dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia sehingga kemudian dapat menambah lapangan pekerjaan. Tentu saja dalam hal ini membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan hambatan dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kamelanta. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, daftar dan informasi. Beberapa hambatan yang terjadi dalam kegiatan budidaya rumput laut adalah ketergantungan berlebihan petani rumput laut kepada pemerintah, kurangnya pemahaman pelaku usaha pada pemberdayaan dan kurangnya infrastruktur seperti pabrik modern dalam mendukung pemrosesan produk yang lebih bernilai ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa upaya di Dinas Kelautan dan Perikanan seperti: 1) mengundang investor asing, 2) membuat program seperti saffver pembangunan berkelanjutan dari kultivator untuk mengolah rumput laut sebagai bentuk ketahanan pangan.

Kata kunci: pemberdayaan, petani rumput laut, rumput laut

PENDAHULUAN

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidak-mampuannya, baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Intinya dari penjelasan pemberdayaan di atas adalah masyarakat secara individu dapat dikatakan berdaya apabila dapat melakukan apapun secara mandiri. Tujuan diterapkannya pemberdayaan ialah agar masyarakat mampu mencapai kesejahteraan.

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya kelautan khususnya budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut sangat populer di Masyarakat Pesisir

Kabupaten Buton dan dilaksanakan hampir diseluruh kecamatan dan pesisir di Kabupaten Buton. Usaha ini merupakan usaha pembudidayaan rakyat yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok pembudidaya dengan skala usaha yang relatif masih kecil namun karena hampir seluruh masyarakat pantai di Kabupaten Buton melaksanakan kegiatan usaha budidaya rumput laut ini, dengan volume produksi mencapai 4,291.79 ton.

Sebagaimana dengan penjelasan di atas, bahwa Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah potensial yang dapat dijadikan lokasi budidaya rumput laut. Luasan areal yang dikelola saat ini \pm 1,182.40 Km² dengan volume produksi rumput laut mencapai 4,291.79 ton. dengan komposisi wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan, (Kamaru) dengan luas 327.29 Km², Siontapina (Manauwa) 88.09 Km², Pasar wajo 356.40 Km², Wabula 51.58 Km² dan Kapontori (Mataumpana) 113.00 Km².

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa potensi rumput laut di Kabupaten Buton adalah yang paling tinggi dengan tingkat produksi 4,291.79 Ton di tahun 2016, berbanding jauh dengan potensi perikanan budidaya lainnya dengan volume produksi yang tidak mencapai 1000 ton . Hal ini membuktikan bahwa potensi rumput laut di Kabupaten Buton sangat menjanjikan untuk di kelola secara maksimal. Namun penulis melihat adanya ketimpangan, dengan produksi produksi paling besar, namun rumput laut buton masih belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi menjanjikan. Hal ini tentunya diakibatkan oleh pengolahan yang belum maksimal serta keterbatasan teknologi modern.

Tabel 1

Tabel Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Buton Tahun 2016 (Ton)

No	Kecamatan	Rumput Laut	Mabe	2016			Jumlah
				Kerapu	Kuwe	Lobster	
1	Lasalimu			2,46		0,64	3,10
2	Lasalimu Selatan			0,26	0,76	0,57	1,59
3	Kapontori	3.496,33	234,00	32,76			3.763,09
4	Siontapina	795,46					795,46
5	Wolowa						-
6	Pasarwajo			47,78	2,49		50,27
7	Wabula						-
Jumlah		4.291,79	234,00	83,26	3,25	1,21	4.613,51

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Teknologi modern diperlukan bukan hanya mengikuti tren masa kini, namun teknologi modern telah menjadi kebutuhan dalam kegiatan produksi budidaya sekalipun. Masyarakat petani rumput laut di Kabupaten Buton hanya terbatas pada penggunaan tali tambang dalam proses budidaya rumput laut.

Fenomena rendahnya fasilitas, teknologi dan pemanfaatan potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Buton berimplikasi pada nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya petani rumput laut. Daya serap tenaga kerja, tingkat kemiskinan, nilai jual yang rendah menjadi polemik yang belum terselesaikan hingga saat ini di Kabupaten

Buton. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa bergerak cepat dalam menggerakkan potensi wilayahnya melalui pengembangan wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk memahami peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut, maka penulis akan fokus kepada : 1) Bagaimana proses pemberdayaan petani rumput laut di Desa Kamelanta; 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Petani Rumput Laut di Desa Kamelanta.

Pemberdayaan berasal dari kata “ daya “ yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan,

berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya (Roesmidi 2006:1).

Pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas terhadap perbaikan mutu-hidup masyarakat yang akan difasilitasi. Fasilitas ini, dapat terdiri dari aparat pemerintah (ASN), aktivis LSM, atau tokoh masyarakat warga setempat. Untuk itu pemberdayaan ini juga memerlukan fasilitator yang berperan atau bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan (Mardikanto, 2015:66).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: (Mardikanto,2015:30)

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang demikiannya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

3. *Memberdayakan* mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah,

oleh karena itu kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada program pemberian (*charity*).

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Perlu untuk diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang di alaminya.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 2014:67):

a. *Pemungkinan*: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- b. *Penguatan*: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. *Perlindungan*: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. *Penyokongan*: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak mudah terjatuh edalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. *Pemeliharaan*: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Sumadyo dalam (Chabib Sholeh, 2014:85) ada 3 hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan menurut mardikanto dalam halaman yang sama

menambahkan satu lagi yaitu bina kelembagaan. Selanjutnya dibahas secara padu dalam ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat, adapun ruang lingkup yang dimaksud adalah sebagai berikut (Chabib Sholeh, 2014: 88):

1. Bina Manusia

Bina manusia, merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dikatakan pertama dan paling utama karena (1) tujuan pemberdayaan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan dari masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, (2) yang menjadi subyek dalam pemecahan masalah adalah masyarakat miskin itu sendiri, sementara pihak luar hanyalah bertindak sebagai fasilitator dalam memperkuat daya atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin yang menjadi sasarannya, (3) melalui pembinaan kemampuan manusianya, diharapkan mereka memiliki kemauan dan keberanian untuk memecahkan masalahnya sendiri secara berkelanjutan, sehingga tidak akan menimbulkan ketergantungan kepada pihak pemberdaya.

2. Bina Usaha

Bina usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat, karena (1) Bina manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat miskin, (2) Pemberdayaan dalam bentuk apapun yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka tidak akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi secara aktif

3. Bina Lingkungan

Sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) masalah lingkungan dipandang sangat penting dalam proses pembangunan. Analisis manfaat dan dampak lingkungan (AMDAL) dalam setiap kegiatan investasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa kelestarian lingkungan (fisik) dinilai akan sangat menentukan keberlangsungan kegiatan investasi maupun operasi terutama berkenaan dengan ketersediaan barang baku.

4. Bina Kelembagaan

Menurut Hayami dan Kikuchi dalam (Mardikanto : 2012) kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh suatu anggota komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari-hari kelembagaan sering diartikan sebagai institusi sosial atau pranata sosial tetapi juga sering diartikan sebagai organisasi sosial. Akan tetapi apapun itu, pada prinsipnya kelembagaan merupakan bentuk relasi sosial yang setidaknya memiliki empat komponen yaitu (1) adanya sekelompok orang yang dapat diidentifikasi dengan jelas; (2) adanya tujuan yang akan dicapai, yang membuat mereka saling bekerjasama/ berinteraksi; (3) adanya aturan yang ditaati dan mengikat mereka dalam berinteraksi/bekerjasama dan (4) adanya struktur organisasi, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus mereka jalankan sesuai aturan yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian magang kali ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut nazir (2011:54) bahwa, "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

Wawancara

Menurut Simangunsong (2016:215), wawancara adalah metode pengumpulan data dengan pendekatan secara mendalam antara penulis kepada informan, media yang digunakan penulis dalam wawancara adalah melalui proses komunikasi dengan rentetan pertanyaan yang menunjang serta berhubungan erat kaitannya dengan fokus penelitian, tujuan dari komunikasi yang dilakukan ialah mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab.

Di lokasi magang penulis akan melakukan wawancara sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2 Data Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala dinas perikanan dan kelautan	1 orang
2	Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 orang
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1 orang
4	Kepala Desa Kamelanta	1 orang
5	Masyarakat petani rumput laut setempat	9 orang
Jumlah		13 orang

Sumber: Penulis

observasi

Observasi ialah kegiatan mencari data dengan memanfaatkan pancaindra penulis, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan meyakini informasi yang berada dilapangan, keadaan realitas data yang nantinya dapat menjadi acuan dalam menjawab permasalahan penelitian. Di dalam observasi terdapat beberapa objek, Menurut Spadley dalam Sugiyono (2017:229), observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Pada penelitian ini, tempat yang akan diamati yaitu di wilayah pesisir pantai Kabupaten Buton Tepatnya di Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kamelanta, dan Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Actor*, yaitu pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini maka yang menjadi pelaku dari proses pemberdayaan bagi masyarakat petani rumput laut ialah pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dilakukan oleh Dinas perikanan dan kelautan Kabupten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:274), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknik dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data dari sumber yang berkaitan dengan tujuan pengamatan dengan tidak menyebabkan gangguan pada obyek yang diamati. Dokumen merupakan perlengkapan penggunaan metode wawancara dalam penelitian. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan:

- a. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicapai datanya.
- b. *Check-list*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya dalam hal ini peneliti tinggal memberikannya tanda pada setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

Jadi dokumentasi merupakan salah satu alat pendukung yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik Triangulasi dalam menganalisis data. Triangulasi dapat dilakukan terhadap teori, metode dan data. Pada bagian teori, penulis menganalisisnya sebagai pemandu sejumlah teori yang landasan konsep penelitian, sebagai acuan dalam penggunaan berbagai metode dalam penelitian. Data sebagai pengambilan data dari berbagai tempat maupun kasus. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara menghipunkan berbagai macam data, untuk selanjutnya di hubungkan satu sama lain, yang bersumber

dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2017 : 24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buton merupakan salah satu dari wilayah di Sulawesi Tenggara dengan potensi kelautan yang sangat luar biasa, hal itu dapat kita lihat dari besaran wilayah perairan dengan sumber daya laut yang sangat besar, 88% wilayah dari Kabupaten Buton sendiri merupakan laut. Hal inilah yang membuat Kabupaten Buton dengan potensi terumbu karang yang juga cukup luas yaitu sekitar 884,75 km², mampu menjadi tumpuan serta tolok ukur pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam mengoptimalkan produksi hasil laut yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Buton, dari data terakhir sekitar tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 10.37% – 47.59% terumbu karang di Kabupaten Buton masih tergolong kondisi baik.

Di Kabupaten Buton sendiri memiliki beberapa potensi perikanan budidaya seperti budidaya kerapu dan Rumput laut dan masih banyak lagi, seperti terlihat pada tabel 3. Dari tabel tersebut dapat kita lihat, bahwa tingkat produksi dari usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Buton sangat banyak, akan tetapi produksi rumput laut yang dihasilkan setiap tahunnya mengalami naik turun, dapat kita lihat produksi tahun 2012 senilai 1.929,46 ton turun hingga 1.582,64 ton menjadi 346,82 kwintal. Ketidakstabilan produksi, khususnya produksi rumput laut yang terjadi di Kabupaten Buton tidak lepas dari tanggung jawab dan pengawasan pemerintah Kabupaten Buton itu sendiri, berbagai macam pelatihan dan bantuan telah di berikan dan dialokasikan oleh

pemerintah, namun sampai saat ini masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat itu sendiri. Sejumlah bantuan baik berupa bantuan materil, terkhususnya alokasi dana perihal bantuan seperti tali tambang dan bibit rumput laut telah tersalurkan sebagai mana mestinya,

namun masih ada saja kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak pemerintah, masalah umum yang paling banyak di temukan di lapangan ialah bantuan yang tidak tepat sasaran. (Ibu Irmawati, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan Kabupaten Buton).

Tabel 3
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Buton (Ton/tahun)

Jenis komoditi	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rumput laut	1.929,46	346,82	416,07	4.020,78	429,79
Kerapu	4,96	25,24	26,01	46,74	83,26
Kuwe	-	-	-	2,76	3,25
Mabe	548,24	450,00	215,25	386,00	234,00
Lobster	-	-	-	1,26	1,21
Udang	-	-	-	-	-
Bandeng	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kelautan Kabupaten Buton

Di Kabupaten Buton sendiri pembagian zonasi rumput laut terbesar

terletak di Desa Kamelanta seperti yang dapat kita lihat dari tabel berikut.

Tabel 4
Data Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Buton Tahun 2017

No.	Kecamatan	Rumput laut	Jumlah RTP/ Pembudidaya				Total RTP	Jumlah Keramba
			Mabe	Kerapu	Kuwe	Lobster		
1	Lasalimu	2	-	7	-	4	13	11
2	Lasalimu Selatan	24	-	2	2	1	29	4
3	Kapontori	124	24	8	2	-	158	13
4	Siotapina	75	-	-	-	-	75	-
5	Wolowa	-	-	-	-	-	-	-
6	Pasarwajo	-	-	12	12	-	24	28
7	Wabula	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		225	24	29	16	5	299	56

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton

Dari tabel di atas dapat kita lihat, bahwa mayoritas nelayan yang ada di Desa Kamelanta tidak hanya mengandalkan hasil dari menangkap ikan di laut saja, namun juga banyak dari nelayan kita yang memilih alternatif lain salah satunya dengan melakukan kegiatan budidaya. Untuk kegiatan budidaya rumput laut sendiri terpusat atau paling banyak di produksi di Desa Kamelanta dengan jumlah pembudidaya sebanyak 124 orang. Bentuk nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton yaitu, kontribusi hasil perikanan secara ekonomi merupakan salah satu dari penyumbang terbesar dalam perolehan PAD Kabupaten Buton.

Dalam perjalanannya, proses pemberdayaan yang berlangsung selama ini di wilayah Kabupaten Buton terkhusus di Desa Kamelanta, sudah berjalan secara baik, namun masih ada beberapa hal yang menjadi hambatan baik dari segi proses dan di luar proses dalam implementasi program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan Kabupaten Buton, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat.

Dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buton ialah dengan cara memberikan bantuan secara materil kepada para pembudidaya rumput laut, namun masih ada saja bantuan yang tidak tepat sasaran..

2. Ketergantungan yang berlebih kepada bantuan pemerintah.

Kurangnya keaktifan masyarakat yang memberi kesan ketergantungan

terhadap bantuan yang di berikan oleh pemerintah.

3. Keterbatasan pengetahuan mengenai potensi produk rumput laut.

Banyak dari pembudidaya rumput laut di Desa Kamelanta yang sampai saat ini hanya memproduksi rumput laut sebatas bahan mentah saja, jika melihat perkembangan zaman dan penggunaan teknologi mutakhir, banyak dari potensi rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis, seperti pembuatan keripik, masker, perawatan kulit, dan masih banyak lagi.

Kondisi iklim dan keadaan penduduk pesisir di Kabupaten Buton mengharuskan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Buton harus berusaha ekstra keras dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan di Desa Kamelanta. Pemerintah Kabupaten Buton baru-baru ini telah menjalin sebuah usaha kerjasama dengan mengundang investor asing, seperti jepang. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam mengolah dan memproduksi bahan mentah dari rumput laut. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Buton telah meluncurkan beberapa program dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan, salah satunya program *sustainable aquaculture development for food security and poverty reduction*, kegiatan ditujukan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton termasuk Desa Kamelanta. Maksud dari program ini

yaitu, meberdayakan masyarakat pesisir di Kabupaten Buton dalam mengolah rumput laut sebagai bentuk ketahanan pangan dan meningkatkan nilai ekonomi keluarga, program ini berjalan dari tahun 2009-2013. Pemerintah setempat juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada kelompok petani rumput laut yang di laksanakan bukan hanya memberikan pengertian dan pengetahuan budidaya namun pihak pemerintah membekali masyarakat dengan pendamping yang ahli di bidang budidaya perairan khususnya rumput laut, kegiatan ini di lakukan setiap tahunnya sambil melihat kemajuan pertumbuhan budidaya dari pelatihan sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang diperoleh di lapangan mengenai pemberdayaan petani rumput laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton di Desa Kamelanta, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan petani rumput laut di Desa Kamelanta sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buton dengan seringnya pemberian bantuan kepada kelompok petani yang ada, baik berupa dana maupun alat-alat budidaya serta penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tersebut dalam upaya memandirikan mereka agar usaha budidaya dapat berkembang dengan baik.

Faktor penghambat dalam pembinaan Kelompok petani rumput laut adalah : a) Bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya wawasan dan kurangnya kesadaran

masyarakat, khususnya masyarakat petani rumput laut; b) Kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan pentingnya program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton; dan c) Ketergantungan yang berlebihan dari pihak pembudidaya rumput laut terhadap bantuan dari pemerintah.

Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Buton mengatasi hambatan dalam pemberdayaan Petani rumput laut di Kabupaten Buton yaitu dengan mengikutsertakan para pembudidaya dalam acara sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan berbagai stakeholder untuk membuka wawasan dan pengetahuan berbisnis, penggunaan teknologi dan manajemen usaha. Selain itu juga berusaha menyelesaikan secepatnya pabrik pengolahan rumput laut di Desa Kamelanta Kabupaten Buton.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andini, Krisna dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, Oos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kabupaten Buton Dalam Angka*. Buton: UD. SYAHID
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk*

- Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Edy Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Enam. Jakarta: Pranada Media Group.
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2002. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Utama.

Website

- <https://butonkab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1>
- https://www.researchgate.net/publication/316990636_Mengenal_Potensi_Rumput_Laut_Kajian_Pemanfaatan_Sumber_Daya_Rumput_Laut_dari_Aspek_Industri_dan_Kesehatan.